

BAB IV

KETERLIBATAN TURKI DI DALAM KASUS KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA DI BANGLADESH

Bab ini menganalisis tentang keterlibatan Turki terhadap kasus krisis pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh dengan menggunakan kerangka pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) dan teori pengambilan keputusan luar negeri. Menurut Scott Burcill, Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum bagi emansipasi, keadilan, dan kebebasan manusia. Penolakan suatu etnis, kelompok atau manusia oleh otoritas negara adalah penghinaan terhadap martabat semua manusia. Sedangkan menurut Coplin, kondisi politik dalam negeri merupakan faktor penting dari terciptanya pengambilan keputusan luar negeri di suatu negara, hal ini dikarenakan adanya aktor-aktor domestic yang terlibat di dalam pengambilan keputusan di negara tersebut. Faktor-faktor ini akan dianalisis pengaruhnya terhadap keterlibatan Turki di dalam kasus krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh. Analisis pada bab ini akan dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah Respon Turki terhadap penindasan HAM etnis Rohingya, dan bagian kedua adalah perubahan kebijakan luar negeri Turki pasca partai AKP berkuasa.

A. Respon Turki terhadap Penindasan HAM yang Terjadi pada Etnis Rohingya

Turki memang aktif dalam menangani permasalahan kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara di dunia. Selama lebih dari satu dekade terakhir Turki telah memproyeksikan dirinya di luar negeri melalui bantuan kemanusiaan. Beberapa operasi Turki ini dilakukan dalam skala besar, dan dikelola dengan sangat baik dari awal hingga akhir, dan seringkali mendapatkan penghormatan dari masyarakat yang telah dibantu. Penting untuk dicatat bahwa hal ini bukan pertama kalinya, Turki sendiri memang telah banyak membantu

berbagai permasalahan kemanusiaan, salah satunya operasi bantuan di Aceh, Sumatera Utara, setelah tsunami pada tahun 2004, membantu rakyat Palestina, membantu etnis Uighur, membantu krisis Rohingya, dsb (Noor, 2015).

Turki sendiri merupakan negara peserta Konvensi tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat Internasional terhadap Status Pengungsi. Berdasarkan Konvensi dan Protokol tersebut, negara-negara yang telah meratifikasi harus bekerja sama dengan UNHCR dan membantu menjalankan fungsinya, yang ditetapkan didalam UNHCR tahun 1950 yang tujuannya adalah untuk mencegah dan memperjuangkan HAM. Fungsi lainnya adalah untuk melawan negara-negara yang melakukan tindakan pelanggaran atau kekerasan terkait isu kemanusiaan melalui perlindungan pengungsi. Turki adalah salah satu negara yang membantu dan bertanggung untuk menciptakan dan memelihara lingkungan internasional (Dani, 2017).

Menyusul kemenangannya dalam pemilihan November 2002, pemerintah AKP tidak hanya mempercepat laju demokratisasi di Turki akan tetapi juga memulai proses yang bertujuan melembagakan perlindungan hak asasi manusia dalam administrasi negara, dimana pemerintah Turki mengorganisir pembentukan organisasi dan legislatif yang terdiri dari struktur nasional untuk menangani berbagai macam pelanggaran dan kekerasan terhadap manusia (Casier, 2009, p. 7).

Dari penjelasan di atas, respon Turki terhadap Hak Asasi Manusia dapat dikaitkan dengan konsep HAM yang dikemukakan oleh Scott Burcill, dimana HAM memberikan landasan hukum bagi emansipasi, keadilan, dan kebebasan manusia. Penolakan suatu etnis, kelompok atau manusia oleh otoritas negara adalah penghinaan terhadap martabat semua manusia. Selain itu, hak individu merupakan hak asasi manusia yang berkemungkinan mendapatkan dukungan oleh konsensus global dan komunitas dunia, terlepas dari perbedaan agama atau ideologi (Burcill & Linklater, 2005, p. 68). Sehingga individu

atau kelompok yang mengalami kejahatan Hak Asasi Manusia berhak untuk di dukung oleh negara ataupun komunitas dunia.

Menurut Dr. Altay Atli, seorang peneliti kawasan Asia-Pasifik di *Sabancı University's Istanbul Policy Center*, pada tahun 2016, Turki menjadi sumber bantuan kemanusiaan terbesar kedua di dunia, dengan total 6 miliar USD telah didistribusikan ke berbagai wilayah yang membutuhkan, peran utama Turki dalam permasalahan Rohingya memiliki dua komponen: Bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan dana yang ditawarkan ke Bangladesh untuk menutupi biaya para pengungsi, dan yang kedua adalah inisiatif diplomatik, seperti membawa masalah ini ke PBB dan memobilisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Dua komponen ini, diimplementasikan secara bersamaan. Presiden Erdogan, pada 10 September mendesak negara-negara Muslim untuk "menggunakan segala cara yang tersedia" untuk menghentikan "kekejaman" yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. "Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah Myanmar dan Bangladesh untuk mencegah penderitaan kemanusiaan di kawasan itu," kata Erdogan pada sesi pembukaan pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di ibukota Kazakhstan, Astana. Erdogan mengatakan Turki telah menawarkan bantuan, menambahkan bahwa itu diharapkan bahwa otoritas Bangladesh mengakui dan membantu Muslim Rohingya melarikan diri dari kekerasan (hurriyetaidailynews, 2017).

Turki juga membawa permasalahan Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya ini ke agenda pertemuan Komite Tetap Dewan Parlemen Asia tentang Urusan Sosial dan Budaya yang diselenggarakan pada 31 Agustus – 2 September, dan dihadiri oleh berbagai delegasi termasuk UEA. Atas desakan delegasi Turki, Myanmar termasuk dalam daftar negara-negara di ambang bencana kemanusiaan, selain Suriah, Irak, dan Yaman (Tokyay, 2017).

Erdogan juga telah meyakinkan pemerintah Bangladesh untuk memberikan lebih banyak bantuan pada permasalahan Rohingya yang ada di Bangladesh. Selama pertemuan bilateral

dengan Presiden M Abdul Hamid mengenai kegiatan KTT khusus Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Pusat Kongres dan Pameran Istanbul (ICECA) pada tahun 2017, presiden Turki juga memuji inisiatif dari pemerintah Bangladesh dalam hal ini dan Erdogan juga mengatakan bahwa Turki memiliki prioritas untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam semua aspek. Erdogan berharap hubungan persahabatan antara Turki dan Bangladesh akan mencapai tingkatan baru dengan negara-negara Muslim dalam beberapa hari mendatang. Dia juga menekankan perlunya menggunakan potensi kedua negara dalam menghadapi permasalahan ini. Presiden Hamid (Presiden Bangladesh) menyatakan terima kasih kepada Turki karena memberikan dukungan yang terus-menerus terhadap masalah pengungsi Rohingya, yang berlingung di wilayah Bangladesh. "Hubungan persahabatan dan bilateral antara kedua negara meningkat dari hari ke hari dan itu akan berlanjut di masa depan," ungkap Abdul Hamid (BSS, 2017).

Pemerintah Bangladesh di Istanbul juga memuji hubungan bilateral dengan Turki dan dukungan Ankara kepada negara tersebut atas krisis Rohingya. Seperti yang diutarakan oleh perwakilan dari pemerintah Bangladesh yang berbicara di Universitas Uskudar di Istanbul untuk memperingati Hari Kemenangan ke-47 Bangladesh, Mohammad Monirul Islam mengatakan: "Hubungan kita dengan Turki berjalan sangat baik. Kami, sebagai dua negara, saling menyebut sebagai negara persaudaraan." Pemerintah Bangladesh sendiri menginginkan hubungan dengan Turki dipertahankan tidak hanya di tingkat politik, tetapi juga di tingkat akademik. Ia juga memuji dukungan Turki kepada negaranya dengan mengatakan, "kami berterima kasih banyak kepada Turki atas dukungan mereka atas krisis pengungsi Rohingya." (Tokgoz, 2018).

Turki telah melakukan upaya dan bantuan yang sangat besar pada etnis Rohingya, Turki juga mendorong komunitas internasional untuk menunjukkan peran mereka terhadap krisis. Pemerintah Turki akan terus menyuarakan krisis kemanusiaan yang memengaruhi Rohingya dan juga akan mendukung upaya

antara solusi permanen antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh (Erozden, 2018).

Selain itu, Turki berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Rohingya yang sedang terjadi. Dukungan Turki akan HAM dari etnis Rohingya ini dapat dilihat dari *press release* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Turki No: 224, pada 27 Agustus 2018 tentang Krisis Kemanusiaan Muslim Rohingya. Dalam *press release* itu Dewan HAM PBB menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap Rohingya sama dengan kejahatan berat di bawah hukum internasional. Terlepas dari langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Myanmar dan dialog yang terjadi antara Bangladesh dan Myanmar menuju penyelesaian krisis, akan tetapi proses repatriasi resmi belum dimulai. Turki meminta Pemerintah Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam bekerja sama dengan komunitas internasional dengan tujuan untuk mencapai solusi yang baik bagi krisis ini serta menciptakan kondisi yang kondusif di Negara Bagian Rakhine untuk pengembalian yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan bagi Muslim Rohingya. Turki telah berusaha keras untuk memastikan bahwa komunitas internasional memberikan perhatian yang diperlukan untuk masalah ini sejak awal krisis ini.

Dalam konteks ini, adanya pertemuan Konsultasi Rohingya Internasional, di Ankara untuk bertukar pandangan antara negara-negara yang sepaham dan organisasi internasional yang aktif di wilayah tersebut untuk membahas cara-cara dan sarana untuk mencegah semakin memburuknya kondisi kemanusiaan di Rohingya. Turki juga bertekad untuk mendukung semua upaya yang diarahkan untuk menjaga masalah ini dalam agenda komunitas internasional dan untuk menemukan solusi yang baik untuk krisis ini dalam dialog dengan Myanmar dan Bangladesh (Republic Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2018).

B. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Pasca Partai AKP Berkuasa

William D. Coplin menyebutkan bahwa kondisi politik dalam negeri suatu negara adalah salah satu variable penentu di dalam pembuatan kebijakan luar negeri, hal ini dikarenakan adanya keterlibatan aktor-aktor di suatu negara yaitu *policy influencer system* yang merupakan aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah *partisan Influencers* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri negara tersebut. *Partisan Influencers* atau partai yang mempengaruhi bertujuan untuk menyalurkan tuntutan-tuntutan masyarakat, yaitu suatu tuntutan kepada para pengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara tersebut. Dimana para *influencers* ini mempengaruhi suatu kebijakan dengan cara menekan atau mempengaruhi para penguasa dan dengan menyediakan personel yang dapat berperan dalam pengambilan keputusan tersebut (Coplin & Marbun, 1992, p. 84).

Pasca pemilihan nasional pada tahun 2002, kebijakan luar negeri Turki mulai berubah, hal ini dipengaruhi oleh doktrin dari kepala penasihat kebijakan luar negeri pemerintah baru tentang "*strategic depth*." Implikasi dari doktrin "*strategic depth*" terwujud dalam semua aspek Keamanan nasional Turki dan kebijakan luar negeri. Konsep "*strategic depth*" dalam kebijakan luar negeri Turki mengacu pada karya akademis Profesor Ahmet Davutoglu, yang menerbitkan buku hubungan internasional Turki dengan judul *stratejik derinlik* pada tahun 2001. Isi utama buku Davutoglu adalah nilai suatu negara dalam politik dunia didasarkan pada lokasi geo-strategis dan kedalaman historisnya. Mengikuti logika teori Davutoglu yang dijelaskannya, Turki memang dianugerahi keduanya karena lokasinya di daerah geopolitik yang berpengaruh, terutama kontrolnya atas *Bosphorus* (selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan bagian Asia), dan peninggalan historisnya dari Kekaisaran Ottoman (Walker, 2007, p. 33).

Strategic Depth mengadvokasi upaya untuk mengimbangi ketergantungan Turki pada Barat dengan merangkul banyak aliansi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di wilayahnya. Inti dari argumen ini adalah Turki tidak harus bergantung pada satu aktor dan Turki juga harus secara aktif mencari cara untuk menyeimbangkan hubungannya sehingga dapat mempertahankan independensi yang optimal. Pada pemilihan presiden tanggal 3 November 2002, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang baru dibentuk, memenangkan suara di Turki dan, untuk pertama kalinya, sebuah partai dengan akar Islam secara eksplisit memiliki mayoritas besar di Majelis Nasional Turki atau *Turkish Grand National Assembly* (TGNA). Recep Tayyip Erdogan selaku pemimpin partai AKP yang menjabat menjadi perdana menteri dengan cepat meminta Davutoglu untuk menjadi penasihat kebijakan luar negerinya. Davutoglu diberikan kebebasan untuk membentuk kebijakan luar negeri Turki dengan menerapkan doktrin *strategic depth*-nya (Walker, 2007, p. 34).

Turki telah melihat peran geografis tradisionalnya di lingkungannya yang berubah dengan berakhirnya Perang Dingin. Implementasi yang koheren dari doktrin kebijakan luar negeri baru Turki tentang "*strategic depth*" memang masih belum sempurna, tetapi penerepan ini penting bagi masa depan hubungan Turki baik di lingkungan sekitarnya maupun di luarnya yang sudah mulai terwujud. Yang tak kalah penting dalam transformasi ini adalah perubahan dinamis Turki sendiri, yang menyesuaikan pada visi Perdana Menteri Erdogan tentang kebijakan luar negeri Turki yang aktif terlibat berdasarkan hubungan bilateral dengan negara-negara tetangganya dan menyeimbangkan kepentingan nasional internal dan eksternal Turki sendiri. Erdogan juga memainkan peran yang lebih besar di Eurasia melalui kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah, Rusia, dan Asia Tengah sebagai aktor regional yang terkait secara budaya, mewakili tantangan dan peluang baru bagi Turki. Seperti yang telah diuraikan, peran global Turki telah

bergeser dari penangkal militer geo-strategis Barat ke model teladan negara mayoritas Muslim, sekuler, dan demokratis.

Ahmet Davutoglu sendiri mengakui, sejak AKP menjadi partai pemerintah dengan posisi dominan di parlemen Turki pada November 2003, 'paradigma baru' muncul dalam kebijakan luar negeri Turki. Menggunakan sumber-sumber yang lebih Islami untuk lebih mendekatkan diri dengan negara-negara yang ada di sekitar Turki, hal ini berpengaruh untuk memajukan visi baru Turki untuk memainkan peran penting sebagai peserta dalam tatanan dunia multi-dimensi yang muncul, dimana Turki masih dalam hubungan positif dengan Amerika Serikat, tetapi Turki juga aktif di Eropa, Timur Tengah dan Asia Tengah. Bercermin pada tren dari masa neo-Ottoman dalam kehidupan intelektual Turki. Menurut Richard Falk, Davutoglu menekankan karakter 'akomodatif' Kekaisaran Ottoman pada puncaknya. Kebijakan luar negeri pemerintah Erdogan di bawah bimbingan Davutoglu mencari kebijakan luar negeri 'tanpa konflik' untuk Turki, serta keseimbangan antara hubungan dengan Eropa, Timur Tengah, Asia, dan dengan Amerika Serikat (Murinson, 2006, pp. 960-961). Konsep baru dari kebijakan luar negeri Turki ini memiliki tiga pilar utama; Pilar pertama yaitu perdamaian Turki dengan identitas dirinya yang islami dan kembali pada akar Ottoman dahulu. Pilar kedua adalah menanamkan rasa akan kebesaran Ottoman dan percaya diri pada saat politik luar negeri serta menghilangkan rasa rendah diri di hadapan negara lain. Pilar ke tiga selalu terbuka terhadap Barat dan melakukan hubungan yang berimbang dengan Timur Tengah (Dani, 2017).

Kebijakan luar negeri Turki ini tidak dapat dilepaskan dari besarnya peran presiden Erdogan dan Partai AKP didalamnya. Perubahan politik luar negeri turki ini dibuktikan dengan bantuan Turki kepada etnis Rohingya yang ada di Bangladesh ataupun di Myanmar terkait isu-isu kemanusiaan, Turki mencoba membantu dan bekerjasama dengan Myanmar untuk mencari solusi dengan cara yang damai. Turki datang membantu Etnis Rohingya yang terusir dan tidak diakui oleh

negaranya sendiri, dimana mereka dibantai dengan kejam dengan tujuan untuk membersihkan Etnis Rohingya dari Arakan (Choirul, 2012). Selain itu, Turki juga semakin meningkatkan kegiatan bantuannya ke Bangladesh pada tahun 2017, ketika gelombang baru Muslim Rohingya berlindung di Bangladesh karena krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, Emine Erdoğan, istri dari Presiden Turki bersama dengan, Mevlüt Çavuşoğlu, Menteri Luar Negeri Turki, melakukan kunjungan pada 6-7 September 2017 dan Recep Akdağ, Wakil Perdana Menteri Turki melakukan kunjungan pada tanggal 27 September 2017 ke Bangladesh, untuk memeriksa kondisi kehidupan Muslim Rohingya dan membahas upaya bantuan kemanusiaan Turki. Kunjungan terbaru dari Turki ke Bangladesh adalah Kunjungan Binali Yıldırım pada 18-20 Desember 2017. Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Abdul Hamid, Presiden Bangladesh dan Sheikh Hasina, Perdana Menteri Bangladesh dan mengunjungi Kamp Rohingya di Cox's Bazaar (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2017).

Berdasarkan pada pendekatan Turki terhadap negara-negara di timur tengah dan juga di asia untuk menggabungkan nilai sejarah-budaya dan sosial-budaya dengan tujuan ekonomi dan politik. Aspek budaya dan sejarah diasumsikan membuka jalan bagi objek kebijakan luar negeri AKP yang proaktif. Hubungan Turki dengan Bangladesh adalah contoh tentang bagaimana hubungan ekonomi / komersial dapat dipupuk dari kesamaan budaya dan nilai-nilai umum kedua negara (Baba, 2017, p. 577). Akan tetapi pada tahun 2016, hubungan Turki dan Bangladesh menjadi kompleks. Hal ini karena Bangladesh mengancam permintaan Turki yang secara berturut-turut meminta untuk membebaskan beberapa pemimpin *Jamaat-e-Islami* Bangladesh, salah satunya Mir Quasem Ali yang merupakan pemimpin partai Jamaat e-Islami yang dihukum mati karena kejahatan perang selama Perang Pembebasan Bangladesh oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Bangladesh pada tahun 2013.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya ketegangan kedua negara dapat menghambat investasi dan kemitraan. Penting untuk dicatat bahwa nilai kerjasama antar negara cukup besar, seperti volume perdagangan dua arah adalah 658 juta USD pada tahun 2009. Ekspor Turki ke Bangladesh adalah 134 juta USD sementara ekspor Bangladesh ke Turki berjumlah 523 juta USD. Bangladesh berharap bahwa Turki akan membantu proses ini dengan mengimpor lebih banyak produk farmasi, goni, kulit dan garmen dari Bangladesh dengan harga bersaing. Selain itu, Bangladesh juga mengharapkan investasi Turki di sektor-sektor seperti pembuatan kapal dan tekstil dan juga dalam pengembangan kapasitas di sektor pariwisata dan perhotelan (Zamir, 2010). Investasi langsung asing Turki juga akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi perekonomian Bangladesh.

Selain itu, menurut Faisal Mahmud di dalam artikelnya yang berjudul "*Rohingya crisis brings Turkey and Bangladesh closer*", ia menyebutkan bahwa krisis pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh juga menyebabkan hubungan antara Turki dan Bangladesh kembali membaik. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya bantuan yang dikirim oleh Turki untuk para pengungsi yang ada di Bangladesh (Mahmud, 2017). Binali Yıldırım, selaku perdana menteri Turki, pada kunjungan selama dua hari ke Bangladesh, juga ikut membantu membagikan beberapa makanan yang didistribusikan TIKA, dan meresmikan fasilitas medis di kamp pengungsi Balukhali di Cox's Bazar. Setelah kekerasan meletus di Myanmar pada akhir Agustus, pemerintah Myanmar memblokir semua bantuan PBB ke daerah itu. Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD) dan Direktorat Urusan Agama Turki juga menyediakan bantuan dan perawatan medis di kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh. Perdana Menteri Binali Yıldırım juga memuji pemerintah Bangladesh atas upayanya dalam "membantu" etnis Rohingya yang mengalami tindakan kekerasan dari Pemerintah Myanmar. Dalam konferensi pers menjelang kunjungan resminya ke Bangladesh, Yıldırım

mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah regional seperti krisis Rohingya dan untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara. "Kami akan memiliki kesempatan untuk sekali lagi menggarisbawahi bahwa Turki siap untuk memberikan segala cara untuk berkontribusi dalam masa-masa sulit yang sedang dialami Bangladesh," sebut Yıldırım (Hurriyet Daily News, 2017).

Bahkan disela-sela kunjungannya, Binali Yıldırım menyatakan niat Turki untuk lebih meningkatkan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Bangladesh. Dan pada kunjungan kali itu, Bangladesh dan Turki menandatangani dua dokumen bilateral untuk meningkatkan kerja sama di bidang usaha kecil dan menengah dan mempertahankan standar produk. Perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Turki dan Bangladesh saat itu adalah Nota Kesepahaman antara Yayasan Usaha Kecil dan Menengah Bangladesh serta Organisasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Turki, dan MoU lainnya adalah antara Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) yang lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perindustrian yang dibentuk untuk tujuan mengendalikan standar layanan dan kualitas barang dengan Turkish Standards Institution (TSE). Instrumen kerjasama ini mencakup bidang-bidang seperti usaha kecil dan menengah, produksi industri, standarisasi, pengembangan kapasitas, serta berbagi pengetahuan dan pengembangan keterampilan (The Daily Star, 2017).

Membbaiknya hubungan antara Turki dan Bangladesh ini merupakan sesuatu yang baik bagi kedua negara yang sempat mengalami kerenggangan pada tahun 2016 silam. Perbaikan hubungan Turki dengan Bangladesh jelas akan menguntungkan kedua negara, karena ketegangan kedua negara sedikit banyak berdampak pada kerjasama yang telah/sedang dilakukan seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dimana Turki dan Bangladesh menyepakati beberapa perjanjian, yang mana perjanjian tersebut mencakup berbagai macam bidang, yaitu perdagangan, kerja sama

ekonomi dan teknis, budaya, pelatihan dan pendidikan militer, perbankan, maritim, perpajakan ganda (Baba, 2017, p. 578), dan Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) antara Bangladesh dan Turki yang masih dalam proses (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2016).

Munshi Fayez Ahmed, selaku ketua Institut Studi Internasional dan Strategis Bangladesh (BISS) mengatakan bahwa kebijakan Turki untuk membantu Bangladesh dalam menghadapi kasus krisis pengungsi Rohingya ini jelas membantu kedua negara untuk memperbaiki hubungan mereka yang berantakan sejak 2016 silam (Mahmud, 2017). Bangladesh dan Turki bahkan sepakat untuk memperdalam ikatan ekonomi dan bekerja sama untuk membantu mewujudkan solusi bagi krisis Rohingya. Kerjasama ini berfokus pada bidang-bidang utama seperti perdagangan dan investasi, pertahanan, pendidikan, pariwisata dan konektivitas (Dhaka Tribune, 2017).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Turki mendukung Hak Asasi etnis Rohingya. Turki sendiri berupaya untuk membantu untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya yang sedang terjadi di Myanmar dan Bangladesh. Bahkan pasca adanya penolakan dari pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya, pemerintah Turki meminta Bangladesh untuk kembali menerima pengungsi Rohingya dan Turki bersedia untuk menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan Bangladesh kepada pengungsi Rohingya, yang merupakan respon Turki terhadap penindasan HAM yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

Keterlibatan Turki dalam kasus ini tidak dapat dilepaskan dari peran AKP didalamnya. Pasca pemilihan nasional pada tahun 2002, kebijakan luar negeri Turki mulai berubah, hal ini dipengaruhi oleh doktrin dari kepala penasihat kebijakan luar negeri pemerintah baru tentang "*strategic depth*." Perubahan kebijakan Turki yang awalnya lebih Pro-Barat kini secara

perlahan mulai bergeser orientasinya ke Negara Dunia Timur. Tidak hanya ke bagian Timur akan tetapi Turki juga mulai meningkatkan Hubungannya ke daerah Asia, salah satunya Bangladesh, dimana Turki memang memiliki hubungan yang panjang dengan Bangladesh, akan tetapi hubungan kedua negara menjadi renggang pada tahun 2016.

Kasus krisis pengungsi Rohingya sendiri kembali membuat hubungan Turki dan Bangladesh mendekat. Mendekatnya hubungan Turki dan Bangladesh jelas merupakan hal yang baik bagi kedua negara, hal ini dikarenakan ketegangan kedua negara sedikit banyak berdampak pada kerjasama yang telah/sedang dilakukan, dimana Turki dan Bangladesh menyepakati beberapa perjanjian, yang mana perjanjian tersebut mencakup berbagai macam bidang, yaitu perdagangan, kerja sama ekonomi dan teknis, budaya, pelatihan dan pendidikan militer, perbankan, maritim, perpajakan ganda, dan Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) antara Bangladesh dan Turki yang masih dalam proses. Mendekatnya hubungan Turki dan Bangladesh tidak lepas dari peran Turki yang bersedia membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh

